# STRATEGI DALAM PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROVlNSl SULAWESl UTARA

# Yehezkiel Waladow

# NPP. 30.1291

# *Asdaf Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara*

# *Program Studi Manajemen Keamanan Dan Keselamatan Publik*

# *Email:* *waladowyehezkiel@gmail.com*

# Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd

# ABSTRACT

# Problem Statement/Background (GAP): Disasters constitute a series of events that endanger and threaten the lives of communities. Disaster management is divided into three stages, starting with the pre-disaster phase or the phase before the occurrence of a disaster, followed by the emergency response phase or the phase during the disaster, and finally the post-disaster phase. Landslides are one of the most frequent and destructive types of natural disasters in South Minahasa Regency. In terms of minimizing casualties and property damage, disaster management during the emergency response phase is crucial and should be implemented swiftly, accurately, and effectively. Purpose: The purpose of this reaserch is to identify and analyze the strategies used by the BPBD in handling landslides during the disaster emergency phase, the inhibiting and supporting factors, as well as the efforts made to overcome existing obstacles in handling disaster emergency response which is located in South Minahasa Regency, North Sulawesi Province. Method: The method used in this research is a descriptive qualitative research method with an inductive approach. In collecting data and information, data collection techniques using interviews, observations, and documentation were used. The data analysis technique used in this research is reduction, presentation, and conclusion drawing. Result: The results of the research show that the BPBD has made every possible effort in handling landslide disasters during the emergency response phase through the programs that have been implemented, but the results have not been optimal. This is due to the hindering factors, both from the internal factors of the Agency, such as a lack of budget, facilities, and human resources, as well as external factors such as the difficult natural conditions and the lack of awareness and cooperation from the community with the BPBD. Conclusion: The researchers recommend that the government, in this case, the Regional Disaster Management Agency of South Minahasa Regency, should improve the quality and quantity of infrastructure, human resources, and budget, and increase efforts to socialize and provide training on emergency response for landslide disasters to the community in order to optimize the previously established programs, so that the goals of the Regional Disaster Management Agency can be achieved.

# Keywords: Strategies, disaster emergency response, landslide

# ABSTRAK

# Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Bencana merupakan serangkaian peristiwa yang membahayakan dan mengancam kehidupan masyarakat. Penanganan dalam bencana terbagi dalam 3 tahap, yaitu dimulai dengan tahap pra bencana atau tahap sebelum terjadinya bencana, tahap tanggap darurat bencana atau tahap saat kejadian bencana, dan tahap pasca bencana. Tanah longsor merupakan salah satu jenis bencana alam yang paling sering terjadi dan paling merusak di Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam hal meminimalisir korban serta kerugian harta benda ,penanganan bencana pada tahap tanggap darurat merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan dengan cepat, tepat dan efektif. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanganan bencana tanah longsor pada tahap darurat bencana, faktor-faktor yang menjadi pengahambat dan pendukung, serta upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan yang ada dalam penanganan tanggap darurat bencana yang berlokasi di Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Dalam mengumpulkan data dan informasi, digunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisi data yang digunakan pada penelitian ini adalah reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian yang peneliti dapatkan adalah bahwa Badan Penanggulangan Bencana telah melakukan upaya semaksimal mungkin dalam penanganan bencana tanah longsor pada saat tahap terjadinya bencana atau tanggap darurat bencana melalui program-program yang telah dijalankan namun belum mendapat hasil yang optimal. Hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor pengahambat baik dari internal Badan, yaitu kurangnya anggaran, sarana prasarana dan SDM maupun dari eksternal yaitu kondisi alam yang berat dan masyarakat yang masih belum memiliki kesadaran dan Kerjasama dengan BPBD. Kesimpulan: Peneliti menyarankan kepada pemerintah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan agar lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana, sumber daya manusia serta anggaran dan meningkatkan upaya sosialisasi serta pelatihan tanggap darurat bencana tanah longsor kepada masyarakat dalam hal untuk mengoptimalkan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya agar apa yang menjadi tujuan BPBD bisa tercapai.

# Kata Kunci : Strategi, tanggap darurat bencana, tanah longsor

# PENDAHULUAN

# Latar Belakang

# Bencana merupakan serangkaian peristiwa yang membahayakan dan mengancam kehidupan masyarakat. Bencana bisa disebabkan oleh tiga faktor, yaitu faktor alam, faktor non alam dan faktor manusia yang bisa mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta terganggunya psikologis manusia. Penanganan dalam bencana terbagi dalam 3 tahap, yaitu dimulai dengan tahap pra bencana atau tahap sebelum terjadinya bencana, tahap tanggap darurat bencana atau tahap saat kejadian bencana, dan tahap pasca bencana, yaitu tahap setelah terjadinya bencana.

# Kabupaten Minahasa Selatan merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam tanah longsor yang diakibatkan karena faktor iklim dan topografinya. Penanganan bencana merupakan tindak lanjut dari apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang, meskipun masih banyak masyarakat yang belum sadar dan paham akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dalam mencegah terjadinya bencana, pemerintah bertanggungjawab untuk menangani dan menanggulangi bencana alam mulai dari tahap pra bencana, tanggap darurat bencana hingga pasca bencana. Oleh karena itu, diperlukannya instansi pemerintah yang bertanggungjawab langsung untuk menjalankan fungsi tersebut hingga dibentuknyalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

# Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki tujuan untuk melaksanakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi yang mencakup aspek penanggulangan pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

# Ketika terjadinya bencana, sangat perlu untuk diperhatikannya kondisi masyarakat atau korban terdampak bencana secara cepat, tepat dan efisien agar supaya dapat meminimalisir korban bencana, baik korban jiwa ataupun korban luka-luka serta juga untuk menyelamatkan barang berharga milik korban. Oleh karenanya, aksi penanganan tanggap darurat bencana menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diketahui dan dilaksanakan. Respon tanggap darurat yang cepat dan tepat oleh pemerintah merupakan suatu keharusan ketika terjadinya suatu bencana alam, pemerintah dalam hal ini BPBD , memegang kontrol kendali atas pengkoordinasian berbagai instansi terkait untuk melaksanakan tindakan tanggap darurat, seperti search and rescue ( SAR ), bantuan logistik dan kamp pengungsian.

# Melihat masalah yang timbul akibat bencana tanah longsor serta juga penanganan tanggap darurat yang belum maksimal, maka diperlukan peran aktif dengan strategi yang tepat sehingga permasalahan tersebut bisa diantisipasi

# Peneliti mengambil judul “Strategi Dalam Penanganan Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara” karena peneliti tertarik dan penting untuk meneliti strategi yang dibutuhkan dan dipergunakan dalam penanganan tanggap darurat bencana tanah longsor di kabupaten Minahasa Selatan. Minahasa Selatan memiliki tingkat kerawan bencana yang tinggi, khususnya bencana tanah longsor.

# Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

# Ada beberapa masalah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu dalam hal anggaran pelaksanaan serta keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam dukungan dan kerjasama dengan pemerintah, serta juga keterbatasan sumber daya manusia. Dalam hal anggaran serta sarana prasarana, anggaran dan sarana prasarana dari BPBD masih tergolong sangat memprihatinkan, akibatnya penanganan tanggap darurat akan bencana tanah longsor seringkali belum optimal dalam hal kecepatan dan proses penangananya. Anggaran yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Selatan hanya sebatas anggaran kehidupan kantor, mobilisasi dan keperluan mitigiasi pra bencana dan belum mencukupi untuk pengadaan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan penanganan tanggap darurat bencana seperti pengadaan alat berat dan kendaraan spesialisasi bencana lainnya. Anggaran untuk mobilisasi personel ketika terjadi bencana dan bantuan langsung korban bencana pada saat tanggap darurat bencana masih bersandar masih belum tercukupi dan hanya bersandar pada dana tak terduga dari pemerintah daerah kabupaten yang juga masih dianggap kurang memadai. Hal ini membuat proses penanganan korban bencana menjadi tidak optimal sehingga masyarakat yang menjadi korban terdampak mengalami kesusahan. Terkait juga dengan kesadaran masyarakat terdampak bencana yang menjadi objek dalam penanganan tanggap darurat bencana masih belum menyadari dengan seksama pentingnya kerjasama dengan pemerintah dalam hal untuk melaksanakan proses penyelamatan dan evakuasi sehingga membuat penanganan korban yang seharusnya berjalan sesuai rencana operasi menjadi terhambat. Masih banyak masyarakat yang tidak mau untuk diatur dan diberikan arahan terkait dengan pengaturan keselamatan dan penghidupan korban pada saat terjadinya bencana, seperti korban bencana yang tidak mau untuk dievakuasi dari tempat tinggal mereka, korban bencana yang masih mendahulukan harta benda mereka dari pada potensi ancaman bahaya di lokasi bencana, korban bencana yang tidak mau untuk berada dalam pos pengungsian dan hanya ingin tinggal di zona merah bencana, serta korban bencana yang tidak kondusif dalam penyaluran bantuan logistik bencana. Hal ini membuat pelayanan penyelamatan dan evakuasi menjadi terhambat dalam pelaksanaannya, sehingga membuat personel dan pegawai BPBD harus mencari cara untuk mengantisipasinya. Berkaitan dengan masalah sumber daya manusia, dalam proses penyelenggaraan penanganan tanggap darurat bencana, BPBD masih belum optimal dalam melaksanakan tugas pelayanan kebencanaannya dikarenakan salah satu faktor, yaitu masih kurangnya jumlah pegawai/personel BPBD yang ada. Hal ini sangat membuat pelaksanaan penanggulangan bencana, khususnya penanganan dalam fase tanggap darurat bencana menjadi sangat berat dan padat, seringkali apabila terjadi suatu bencana yang berdampak cukup berat, hampir semua pegawai BPBD turun ke lapangan untuk membantu pelaksanaan penyelamatan, evakuasi dan pemberian bantuan kepada korban terdampak. Jumlah personel yang masih kurang membuat tidak adanya waktu beristirahat bagi pegawai yang turun ke lapangan ketika terjadinya bencana BPBD Kabupaten Minahasa Selatan memiliki 36 pegawai yang terdiri dari 22 pegawai dengan status aparatur sipil negara (ASN) dan 14 pegawai dengan status kontrak atau disebut sebagai tenaga harian lepas (THL). Jumlah ini masih tergolong kurang tercukupi dalam melaksanakan tugas operasional penanganan tanggap darurat bencana yang sangat menguras tenaga,waktu dan pikiran. Apabila terjadi bencana dalam skala yang besar, petugas dari BPBD semuanya turun ke lapangan untuk melaksanakan tugas pelayanan kebencanaan tanggap darurat dengan rentang waktu satu sampai tiga minggu tergantung skala kerusakan dan dampak bencana yang ditimbulkan sehingga dengan jumlah personel BPBD yang sedikit banyak bagian tugas operasional lain yang seringkali belum dapat dioptimalkan, selain itu dengan jumlah personel yang sedikit membuat semua personel BPBD harus terus s*tandby* dilapangan tanpa adanya rotasi personel yang bertujuan untuk memberikan waktu istirahat bagi petugas di lapangan. Hal ini tentu membuat daya juang dan kinerja dari petugas di lapangan menurun akibat dari kelelahan fisik dan psikis sehingga pada akhirnya berdampak pada berkurangnya pelayanan tanggap darurat bencana dari BPBD kepada korban bencana.

# Penelitian Terdahulu

# Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penanganan bencana tanah longsor. Penelitian Atrin Chrisopras Setyowati dan Dra. Margaretha Suryaningsih, MS yang berjudul implementasi kebijakan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat bencana tanah longsor di badan penanggulangan bencana daerah kabupaten semarang (Atrin Chrisopras Setyowati, Dra. Margaretha Suryaningsih, MS,2019), penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan tanggap darurat oleh BPBD di Kabupaten Semarang telah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana hanya saja implementasinya menjadi kurang optimal karena masih terdapat faktor penghambat seperti kesalahpahaman alur pemberian bantuan dan sosialisasi, sumber daya, kondisi politik, kondisi sosial dan struktur birokrasi. Namun disamping itu terdapat pula faktor pendorong yakni standar dan sasaran yang ditunjukkan dengan SOP tentang kedaruratan serta hubungan antar organisasi dengan lembaga terkait yang telah berjalan dengan baik.

# Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sania Suci Ramhadani danYusuf Adam Himan yang berjudul strategi BPBD Kabupaten Pacitan dalam penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor (Sania Suci Ramhadani, Yusuf Adam Himan, 2022). Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif, yang mengemukakan hasil temuan berupa upaya-upaya yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pacitan dalam menanggulangi bencana banjir dan tanah longsor dapat dikatakan berhasil, hal ini dibuktikan dengan kabupaten pacitan mendapatkan penghargaan “Anugerah Bidang Kebencanaan” dari BNPB dalam Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) yang diselenggarakan pada tahun 2020. Keberhasilan tersebut dapat diraih dengan berbagai bentuk strategi yang telah dikeluarkan untuk menangani masalah kebencaan yang terjadi diantaranya ada pembentukan DESTANA, pengadaan sosialisasi, pengadaan simulasi, penetapan peta daerah-daerah rawan banjir dan longsor, penetapan daerah untuk evakuasi, pemasangan rambu informasi rawan bencana, pembangunan tanggul-tanggu disepanjang sungai yang kerap meluap dan disepanjang lereng gunung yang mudah longsor, serta penanaman mangrove di muara sungai yang berbatasan langsung dengan longsor, serta penanaman mangrove di muara sungai yang berbatasan langsung dengan laut.

# Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rizal Ahmad Fadillah dengan judul penelitian “Analisis kinerja aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana di Kabupaten Bandung Barat (Rizal Ahmad Fadillah,2021). Penelitian ini mengemukakan bahwa Kinerja Aparatur BPBD dalam penanggulangan bencana dalam pelaksanaan tahap tanggap darurat di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa kinerja para pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat dikategorikan baik dalam hal tanggap darurat bencana yang dilaksanakan di lapangan. Meskipun begitu, masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk menunjang pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Penghambat tersebut antara lain: 1. Kinerja Para Pegawai Rata-Rata Belum Mencapai Target; 2. Kurangnya Jumlah Aparatur BPBD dalam Penanganan Tanggap Darurat Bencana; 3. Ketersediaan Perangkat Pendukung Teknologi; 4. Kurangnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Tanggap Darurat Bencana.

# Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Su Ritohardoyo dengan judul penelitian “Strategi penghidupan masyarakat korban bencana tanah longsor di Kabupaten Banjanegara” (Su Ritohardoyo, 2016). Penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tipe akibat bencana, aktivitas masyarakat pasca bencana, serta mengkaji peran pemerintah dalam menanggulangi bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi pemerintah setempat dalam memulihkan kembali penghidupan masyarakat pasca bencana tanah longsor lebih ke aktivitas memulihkan perekonomian masyarakat; tipe akibat bencana tanah longsor terbagi menjadi dua, yaitu akibat langsung (kerusakan infrastruktur, pemukiman, dan alam) dan akibat tidak langsung (perubahan aktivitas sosial, rumah tangga, dan perubahan matapencaharian); dan masyarakat berperan serta aktif dalam mendukung pemerintah untuk melakukan penanganan bencana yang lebih baik.

# Pernyataan Kebaruan Ilmiah

# Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni berfokus pada pengembangan penanggulangan bencana tanah longsor pada tahap tanggap darurat dimana fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan trianggulasi data berbeda dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, indikator yang terdapat dalam *grand theory* yang digunakan peneliti juga berbeda dari penelitian sebelumnya, yakni menggunakan teori strategi dari James Brian Quinn (1991) yang menyatakan bahwa strategi dapat dilihat/diketahui dari 3 dimensi, yaitu tujuan, kebijakan, dan program yang dimana ketiga dimensi tersebut saling berkaitan untuk mendapatkan strategi yang optimal.

# Tujuan

# Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanganan tanggap darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Minahasa Selatan.

# METODE

# Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif yang dimana didalamnya mencakup metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif sebagaimana berdasarkan konsep yang sudah dijelaskan oleh (Sugiyono, 2009:3), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran masalah yang akan diteliti, pendalaman karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan. Peneliti mengumpulkan data melaui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan yang terdiri dari 5 orang dilingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu kepala pelaksana BPBD, sekretaris badan, kepala bidang kedaruratan dan logistik, kepala seksi perencanaan dan pelaporan, dan kepala seksi peralatan dan logistik. Serta juga 4 orang dari masyarakat yang menjadi korban terdampak bencana tanah longsor di Kabupaten Minahasa Selatan. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian disajikan, dianalisis, direduksi kemudian ditarik kesimpulan.

#  HASIL DAN PEMBAHASAN

# Peneliti menganalisis strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam penanganan tanggap darurat bencana tanah longsor dengan menggunakan teori strategi dari James Brian Quinn (1991), yang menggunakan 3 (tiga) dimensi sebagai alat ukur, yaitu tujuan, kebijakan dan program, yang dimana ketiga dimensi tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain dalam menganalisis suatu strategi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada sub bab berikut.

#  Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dibentuk dengan landasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang selanjutnya menjadi dasar pembentukan organisasi lewat Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1 Tahun 2009 yang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Minahasa Selatan sudah menangani berbagai jenis bencana alam, mulai dari yang tingkat rendah sampai pada tingkat tinggi/merusak. Berbagai jenis bencana alam seperti tanah longsor, banjir, abrasi, gempa bumi, angin keras, gunung meletus sampai pada bencana non alam seperti covid 19. BPBD Kab. Minahasa Selatan terus berbenah dari hari ke hari, baik secara internal maupun eksternal agar dapat menangani serta dapat mengurangi dampak resiko yang terjadi akibat bencana yang semakin hari terus bertambah.

* 1. **Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Dalam Penanganan Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor**

Strategi menurut BPBD Kabupaten Minahasa Selatan adalah sebuah bentuk rencana usaha yang disusun dengan seksama untuk dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh suatu organisasi atau instansi pemerintah dalam hal ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang merupakan organisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap berjalannya segala urusan manajemen penanggulangan bencana di Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam mewujudkan berjalannya suatu kegiatan dan rencana aksi penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat khusunya dalam hal ini bencana tanah longsor, BPBD memiliki strategi yang digunakan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Renstra BPBD Kabupaten Minahasa Selatan, 2021-2026). Pengukuran terhadap suatu analisis strategi merupakan suatu bentuk rencana yang mengintergrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan, dan rangkaian program. Penelitian ini didasarkan pada satu teori yang merupakan suatu alat untuk menganalisis dan mengkaji serta mencari tahu sebuah jawaban permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini. Teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori dari James Brian Quinn dalam buku *The Strategy Process (Concepts, Contexts, Cases)* (2003:10*)* yang menggunakan tiga dimensi sebagai alat ukur strategi, yaitu tujuan, kebijakan dan program. Dalam mendukung proses analisis data, peneliti mengumpulkan data dengan teknik wawancara berdasarkan pedoman indikator dari James Brian Quinn dalam *The Strategy Process (Concepts, Contexts,Cases)* (2003:10). Data dan informasi yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara juga didukung oleh informasi lain yang peneliti dapatkan dari hasil observasi atau pengamatan secara langsung ditempat pelaksanaan penelitian dan wilayah yang pernah tejadi bencana tanah longsor , serta juga dari dokumentasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Minahasa Selatan. Dalam upaya peneliti untuk mengetahui bagaimana strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanganan tanggap darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Minahasa Selatan, didasarkan pada hasil informasi dan teknik penelitian yang digunakan, maka dapat diuraikan analisis sebagai berikut.

* + 1. **Tujuan**

Dalam rangka mengoptimalkan penanganan bencana dalam tahap tanggap darurat, ada 4 (empat) upaya pencapaian tujuan utama, yaitu: 1). Meningkatkan pengelolaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berwawasan pelayanan pada masyarakat berkelanjutan dengan sasaran pengeloaan penanggulangan bencana yang berfokus pada kebutuhan korban bencana alam pada saat masa tanggap darurat bencana. 2). meningkatkan fungsi BPBD dalam teknis penanggulangan bencana dengan sasaran meningkatkan presentase kualitas penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat bencana.Pencapaian tujuan ini diusahakan melalui peningkatan jumlah bencana yang ditangani, peningkatan sarana dan prasarana kedaruratan, dan peningkatan pengelolaan pengungsian korban bencana. 3). peningkatan kualitas informasi dan koordinasi sumber daya lintas sektoral dalam upaya pelayanan penanggulangan bencana yang terpadu dan terencana sehingga dapat menurunkan angka korban terdampak bencana. 4). Peningkatan sumber daya manusia aparatur perencana yang diharapkan bisa memberikan strategi-strategi serta perancangan pemodelan upaya penanggulangan bencana mulai dari tahap pra bencana, tanggap darurat bencana sampai pasca bencana

* + 1. **Kebijakan**

Adapun kebijakan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1). Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pada Bidang Informasi Dan Teknolog. 2). Kebijakan Peningkatan Anggaran Sarana Dan Prasarana Penunjang. 3). Kebijakan Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pengungsian Dan Penguatan Koordinasi Lintas Sektoral. Berdasarkan observasi yang telah peneliti peroleh ketika turun ke langsung ke lapangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan yang telah dibuat BPBD Kabupaten Minahasa Selatan sudah sesuai dengan permasalahan yang ada di sektor penanganan tanggap darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Minahasa Selatan tinggal bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut terlaksana dengan baik agar permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan kebijakan-kebijakan yang telah keluarkan.

* + 1. **Program**

Program merupakan suatu sistem rancangan sebuah kegiatan dari satu organisasi yang terstruktur, terpadu dan tersistematis yang dijalankan dalam kurun waktu tertentu dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, tujuan dari program itu sendiri adalah untuk mempermudah penyelesaian suatu permasalahan dengan membantu mempercepat pencapaian visi dan misi suatu organisasi, membantu organisasi untuk dapat bekerja lebih terarah dan terstruktu, serta membantu menjawab kebutuhan organisasi. Dalam menerapkan tujuan dan kebijakan yang telah tetapkan sebelumnya, maka Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Minahasa Selatan memiliki program khusus yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dalam tahap tanggap darurat bencana tanah longsor. (Renstra Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Minahasa Selatan, 2021-2026). Peneliti mengetahui terdapat 3 (tiga) program khusus yang dimiliki BPBD Kabupaten Minahasa Selatan untuk meningkatkan presentase pelayanan tanggap darurat bencana kepada korban bencana tanah longsor di Kabupaten Minahasa Selatan. Tiga program yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1). Program Pelaporan Kedaruratan Berbasis Teknologi Informasi. 2). Program Sosialisasi Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor Kepada Masyarakat. program dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sangat baik dan terukur yang dimana sasaranya adalah untuk memberikan pelayanan maksimal kepada korban bencana tanah longsor dalam hal penyelamatan dan evakuasi, penyaluran distribusi logistik bencana, dan kepengurusan pengungsi dengan kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan. Kemudian program dari BPBD ini juga memperhitungkan bagaimana caranya agar beban dari korban bencana akibat tanah longsor dapat berkurang.

* + 1. **Faktor penghambat dan pendukung dalam penanganan tanggap darurat bencana tanah longsor**

Faktor-faktor penghambat jalannya penanganan tanggap darurat bencana tanah longsor oleh BPBD terbagi dalam 4 (empat) faktor, yakni: 1). Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana penunjang. 2). Kurangnya kesadaran dan kerjasama dari masyarakat terdampak bencana. 3). Unsur geografis. 4). Keterbatasan sumber daya manusia di BPBD Kabupaten Minahasa Selatan. Selanjutnya untuk faktor pendukung, BPBD Kabupaten Minahasa Selatan dalam penanganan tanggap darurat bencana tanah longsor berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dilapangan dengan hasil sebagai berikut: 1). Adanya regulasi atau peraturan tentang penanganan tanggap darurat. 2). Keaktifan unsur relawan tanggap bencana. 3). Bantuan langsung pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kemudian adapun upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam mengatasi faktor-faktor penghambat dalam penanganan bencana tanah longsor pada saat tanggap darurat bencana, yakni berupa: 1). Pengusulan bantuan anggaran dan pengadaan perlengkapan sarana prasarana penunjang. 2). Sosialisasi pentingnya dukungan dan kerjasama penanggulangan bencana kepada masyarakat. 3). Peningkatan infrastruktur fisik dan penanganan lahan. 4). Penambahan pegawai dan perekrutan relawan tanggap bencana.

* 1. **Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penanggulangan bencana tanah longsor pada tahap tanggap darurat merupakan salah satu bentuk pelayanan/respon tanggungjawab pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta mengurangi atau meminimalisir kerusakan serta penderitaan masyarakat korban terdampak bencana tanah longsor di Kabupaten Minahasa Selatan. Hal ini merupakan kewajiban pemerintah daerah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 11 ayat 2 poin e yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam urusan pemerintahan wajib yang meliputi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Lebih rinci dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Penanganan tanggap darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Minahasa Selatan merupakan urgensi yang penting dilaksanakan berdasarkan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh BPBD, hal dikarenakan jenis bencana tanah longsor merupakan jenis bencana alam yang paling sering terjadi dan menimbulkan banyak kerugian di daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Tujuan utama yang telah ditetapkan BPBD tentang penanganan tanggap darurat sebelumnya tercantum dalam Renstra BPBD tahun 2021-2026. Tujuan utama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengelolaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berwawasan pelayanan pada masyarakat berkelanjutan dengan sasaran pengeloaan penanggulangan bencana yang berfokus pada kebutuhan korban bencana alam pada saat masa tanggap darurat bencana.
2. Meningkatkan fungsi BPBD dalam teknis penanggulangan bencana dengan sasaran meningkatkan presentase kualitas penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat bencana.Pencapaian tujuan ini diusahakan melalui peningkatan jumlah bencana yang ditangani, peningkatan sarana dan prasarana kedaruratan, dan peningkatan pengelolaan pengungsian korban bencana.
3. Meningkatan kualitas informasi dan koordinasi sumber daya lintas sektoral dalam upaya pelayanan penanggulangan bencana yang terpadu dan terencana sehingga dapat menurunkan angka korban terdampak bencana.
4. Peningkatan sumber daya manusia aparatur perencana yang diharapkan bisa memberikan strategi-strategi serta perancangan pemodelan upaya penanggulangan bencana mulai dari tahap pra bencana, tanggap darurat bencana sampai pasca bencana.

Berdasarkan tujuan di atas peneliti menyimpulkan bahwa penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat bencana tanah longsor ini perlu diterapkan demi terselenggaranya pelayanan pemerintahan yang baik dalam manajemen bencana yang profesional karena berorientasi pada objek serta hasil pelayanan masyarakat yang mumpuni serta memberikan efek domino yang baik terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah secara luas di Kabupaten Minahasa Selatan. Peneliti menemukan temuan penting, yakni program-program dalam penanaganan tanggap darurat bencana tanah longsor ini sangat penting untuk diimplementasikan karena merupakan bagian dari perwujudan sistem penanggulangan bencana dalam kerangka pelayanan pemerintahan yang baik. Peneliti juga menemukan bahwa faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program ini disebabkan oleh 2 faktor penyebab, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah adanya penghambat dari dalam pemerintahan daerah kabupaten itu sendiri, khususnya BPBD yakni keterbatasan anggaran dan sarana prasarana penunjang serta keterbatasan sumber daya manusia di BPBD Kabupaten Minahasa Selatan. Faktor eksternal merupakan faktor penghambat yang ditimbul dari luar instansi pemerintah itu sendiri, yakni kurangnya kesadaran dan kerjasama dari masyarakat terdampak bencana serta pengaruh unsur geografis Kabupaten Minahasa Selatan.

* 1. **Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Peneliti menemukan bahwa bantuan dari luar BPBD atau pemerintah daerah kabupaten sangat diperlukan dan menjadi penting untuk terus ditingkatkan, baik secara manajerial atau koordinasi serta kualitas dan kuantitasnya. Relawan tanggap darurat bencana merupakan salah satu unsur penting yang membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan penanganan bencana pada tahap tanggap darurat yang secara cepat dan efisien mengurangi efek buruk yang mungkin timbul kepada masyarakat korban bencana dan memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah dalam melihat situasi bencana. Selain itu, bantuan lintas sektoral dari TNI/Polri juga merupakan unsur penting yang bekerja dalam lingkup penanganan evakuasi dan penyelamatan korban bencana, khususnya bencana tanah longsor.

1. **KESIMPULAN**

Peneliti menyimpulkan bahwa strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam penanganan tanggap darurat bencana tanah longsor telah berjalan dengan cukup baik berdasarkan dengan teori strategi menurut James Brian Quinn (1991) yang mengunakan 3 (dimensi) sebagai alat ukur yaitu, tujuan, kebijakan dan program, meskipun masih terdapatnya sejumlah faktor-faktor penghambat yang membuat pelaksanaan tujuan utama BPBD belum maksimal. Strategi yang dijalankan oleh BPBD Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan tahapan yang peneliti sudah jelaskan sudah membuat dan melaksanakan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam penanganan tanggap darurat bencana tanah longsor.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work).*** Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penanggulangan bencana tanah longsor pada tahap tanggap darurat bencana untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

1. **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Minahasa Selatan beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian ini, serta juga kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Quinn, J. B, (2003). *The Strategy Process (Concepts, Contexts, Cases).* New Jersey: Pearson Education.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Reasearch dan Development.* Bandung: Alfabeta.

Atrin Chrisopras Setyowati, Dra. Margaretha Suryaningsih, MS. (2019). *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Pada Tahap Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di Badan Penanggulangan Bencana Daerah.* Semarang.

Sania Suci Ramhadani, Yusuf Adam Himan. (2022). *Strategi BPBD Kabupaten Pacitan Dalam Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor*. Pacitan.

Rizal Ahmad Fadillah. (2021). *Analisis Kinerja Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana*. Bandung.

Su Ritohardoyo. (2016). *Strategi Penghidupan Masyarakat Korban Bencana Tanah Longsor*. Banjarnegara.